

# AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PERAN PERANGKAT DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA JENALAS KECAMATAN GEMOLONG KABUPATEN SRAGEN

Putri Dewi Kusumaningrum <sup>1)</sup>

Suharno <sup>2)</sup>

Bambang Widarno <sup>3)</sup>

<sup>1, 2, 3)</sup> Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta

e-mail: <sup>1)</sup>dewip2309@gmail.com

## ABSTRACT

*This study aims to find out how the application of accountability, transparency and the role of village officials in the management of the Village Development Budget (APBDes) in Jenalas Village. This accountability and transparency in general in the government of Jenalas Village, Gemolong District, Sragen Regency has gone well, although there are still some weaknesses that must be addressed. according to the results of the analysis based on the stages of Village Fund management, namely at the stage of implementation, the implementation of rural infrastructure development activities, namely the construction of the cast road has been running as expected because the implementers of this development activity can be managed directly by the TeamImplementation of Activities formed by the Village Government. The sample in this study used 81 respondents from members of the Jenalas village community institution that were taken using the Purposive Sampling method. The results of the study identified that accountability, transparency and the role of village officials had a significant positive effect on the management of village income and expenditure budgets in Jenalas Village.*

**Keywords:** *Management of Village Revenue and Expenditure (APBDes), accountability, transparency, role of village devices.*

## PENDAHULUAN

Desa merupakan penggerak sistem demokrasi yang bebas dan berkuasa penuh. Desa adalah instansi sosial yang memiliki kedudukan sangat penting di masyarakat. Desa merupakan lembaga bebas dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri yang mengasas kuat dan relatif bebas dari campurtangan kekuasaan diluar lembaga (Faradhiba, 2018: 14).

Pelaksanaan kemandirian daerah di Indonesia dapat dilihat sebagai suatu langkah yang mempunyai tujuan rangkap. Pertama, pemberian kebebasan daerah adalah langkah untuk menanggapi tuntutan masyarakat daerah dalam tiga persoalan utama, *sharing of power, distribution of income* dan kebebasan sistem manajemen didaerah. Kedua, kebebasan daerah ditujukan sebagai langkah untuk memperkuat perekonomian nasional untuk melawan era perdagangan bebas (Faradhiba, 2018: 14).

Penyusunan APBDes dan adanya Dana Desa merupakan wujud desentralisasi untuk mendorong *good governance*. *Good governance* adalah penyelenggaraan pemerintah negara yang kuat dan bertanggung jawab, serta efektif dan efisien dengan melindungi keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Sangat susah untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance* terhadap pemerintahan tingkat pusat ataupun pemerintahan tingkat daerah bahkan pemerintahan desa (Solekhan, 2012: 140).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa terkandung tiga pola otonomi (Solekhan, 2012: 139). Pertama, kedaulatan provinsi sebagai kedaulatan terbatas. Kedua, kedaulatan kabupaten/kota sebagai kedaulatan luas. Ketiga, kedaulatan desa adalah kedaulatan yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah begitu juga sebaliknya pemerintah berkewajiban menghargai kedaulatan asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Kedaulatan desa adalah kewenangan desa untuk memerintah dan membenahi kepentingan masyarakat setempat (Sumpeno, 2015: 139).

Dana Desa merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditujukan untuk Desa dan Desa Adat yang dikirim melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan dimanfaatkan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. (Undang-Undang No 6 Tahun 2014). Kelembagaan desa merupakan lembaga yang mendukung pelaksanaan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Demikian kelembagaan desa harus bekerja secara sinergis dan terpadu untuk mencapai desa yang sejahtera. Pemerintahan desa berlandaskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (Hanifah, 2015: 8).

Hambatan yang terjadi di Desa Jenalas ini pada sistem pengajuan dana ke Kabupaten Sragen. Setiap kepala Desa di kecamatan Gemolong khususnya di Desa Jenalas harus mengajukan RAB ke kabupaten Sragen, yang seharusnya diajukan pada bulan januari tetapi dari pihak kabupaten baru dapat memprosesnya pada bulan maret. Hambatan yang terjadi maka tidak 100% rencana dari pembangunan akan terealisasi semua dalam masa satu tahun anggaran tersebut, dikarenakan keterlambatan dana bantuan dan persetujuan RAB dari kabupaten Sragen. Desa Jenalas dituntut harus menyelesaikan semua rencana tersebut dalam satu tahun anggaran tersebut, dengan tuntutan tersebut membuat perangkat desa harus bekerja keras untuk merealisasikan rencana tersebut. Tuntutan yang ditujukan pemerintah daerah pada pemerintah desa tersebut maka peneliti ingin mengetahui bagaimana hasil kerja dari pemerintah desa atas tuntutan kerja yang diharuskan untuk menyelesaikan perkerjaan tepat waktu dengan hambatan yang tersebut.

Penelitian ini berfokus pada menganalisis tentang realisasi, akuntabel, transparan dan peran semua perangkat desa pada anggaran pendapatan dan belanja desa yang berada di Desa Jenalas. Adapun permasalahan yang lain yang ingin penulis teliti yaitu tentang penerapan transparan dan akuntabel dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), apakah sistem yang mereka terapkan sudah sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang sudah ada. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) digunakan untuk membangun suatu desa agar desa dapat berkembang dan bagaimana peran pemerintah desa dalam realisasi, akuntabel, dan transparan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tersebut di Desa Jenalas Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen.

Peneliti bertujuan untuk mengetahui pendapat atau gagasan dari masyarakat setempat tentang transparansi APBDes di Desa Jenalas tersebut. Jika pendapat atau gagasan masyarakat mengenai peran perangkat desa dalam penyelenggaraan transparansi keuangan desa sudah baik, maka tugas perangkat desa sudah dikerjakan sesuai dengan tanggungjawabnya atau sebaliknya jika peran perangkat desa belum memenuhi syarat yang diharapkan dari masyarakat sekitar maka peran perangkat desa tidak akan berpengaruh positif terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Jenalas tersebut. Belum tentu semua masyarakat desa mengetahui tentang pengelolaan APBDes tersebut meskipun di Desa Jenalas sudah dilakukan sosialisasi tentang keuangan desa kepada setiap RT.

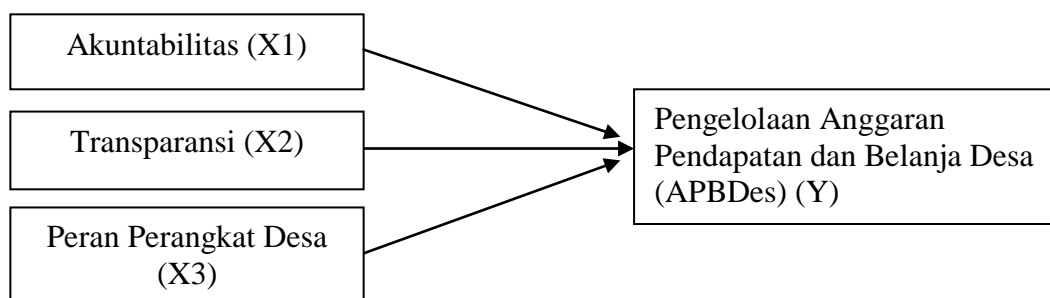
## Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk: 1) Untuk mengetahui akuntabilitas, transparansi, peran perangkat desa dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Jenalas Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen.2) Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Jenalas Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen.3) Untuk mengetahui pengaruh transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Jenalas Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen.4) Untuk mengetahui pengaruh peran perangkat desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Jenalas Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen.

## Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan tiga variabel bebas (*independent*) dan satu variabel terikat (*dependent*). Variabel bebas adalah variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel terikat dan mempunyai pengaruh positif ataupun negatif bagi variabel terikat nantinya. Variabel bebas yang digunakan di penelitian ini meliputi akuntabilitas, transparansi dan peran perangkat desa, sedangkan variabel terikat adalah variabel yang menjadi perhatian utama dalam sebuah pengamatan. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan pada gambar 1.



**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu:

1. Variabel independen  
Variabel independen pada penelitian ini adalah akuntabilitas, transparansi, dan peran perangkat desa.
2. Variabel dependen  
Variabel dependen pada penelitian ini adalah pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.

## LANDASAN TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

1. Pengaruh Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Akuntabilitas adalah proses penganggaran dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban (Indrianasari, 2017). Sangki (2017) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa pelaksanaan program APBDes di Desa Tandu tidak berpengaruh atau tidak menerapkan prinsip akuntabilitas, walaupun penerapan akuntabilitas pada tahap ini pertanggungjawaban hanya diberikan kepada pemerintah daerah. Dari penelitian terdahulu tersebut maka setiap desa harus melakukan tugasnya tentang pelaporan APBDes yaitu melakukan laporan pertanggungjawaban disetiap tahap kegiatan yang sudah terealisasi. Laporan pertanggungjawaban tersebut dapat menilai bahwa suatu desa tersebut sudah

melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan Permendagri 113 Tahun 2014.

H1: Akuntabilitas berpengaruh positif dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

2. Pengaruh Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Transparansi adalah dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan faktor-faktor yang sifatnya material secara bertahap kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa (Hanifah, 2015). Sangki (2017) penelitiannya menjelaskan bahwa transparansi tidak berpengaruh dalam pengelolaan APBDes karena tidak adanya keterbukaan atau transparan mengenai anggaran yang dikelola pemerintah desa dalam hal ini pelaksanaan anggaran, sehingga masyarakat pada umumnya tidak mengetahui secara terperinci mengenai APBDes.

H2: Transparansi berpengaruh positif dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

3. Pengaruh Peran Perangkat Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Peran perangkat desa salah satu unsur pelaku desa memiliki peran penting tersendiri dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa. Perangkat desa merupakan bagian dari unsur pemerintah desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur desa di bawah naungan Kepala Desa (Gunawan, 2013). Peran perangkat desa berpengaruh positif dalam pengelolaan APBDes maka pengelolaan dana desa akan berkualitas baik dan transparan. Hal ini menunjukkan bahwa peran perangkat desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dikatakan cukup berperan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, dapat dilihat dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perangkat desa.

H3: Peran perangkat desa berpengaruh positif dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan berdasarkan hipotesis dan tujuan dari penelitian yang telah dikemukakan, maka penelitian ini dilakukan di Desa Jenalas Kecamatan Gemolong kabupaten Sragen yang terdiri dari 10 dusun. Penelitian ini termasuk penelitian observasi dengan menggunakan beberapa sampel, populasi, dan menggunakan kuesioner sebagai alat untuk mengumpulkan data yang pokok.

### Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua yang bergabung di lembaga kemasyarakatan desa yang terlibat dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Jenalas Gemolong. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode *purposive Sampling*. Metode *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria penelitian. Jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 81 responden dari anggota kelembagaan masyarakat desa.

### Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara mengamati langsung apa yang terjadi di objek penelitian.

2. Wawancara  
Wawancara menjadi metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang memiliki posisi terbaik dalam bidang penelitian tersebut. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini dengan wawancara yang tidak tertata kepada seluruh aparatur desa.
3. Kuesioner  
Daftar pertanyaan penelitian ini merupakan pertanyaan yang berkaitan dengan Akuntabilitas, Transparansi dan Peran Perangkat Desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
4. Studi Pustaka  
Pengumpulan data dengan menggunakan studi pustaka melalui literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

### **Definisi Operasional Variabel yang Digunakan**

1. Akuntabilitas  
Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menjawab, dan menjelaskan tentang kinerja atau tindakan seseorang atau pemimpin suatu organisasi kepada pihak yang mempunyai hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang paling penting dalam menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektivitas, prediktibilitas ataupun reliabilitas.
2. Transparansi  
Transparansi adalah dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah menjelaskan hal-hal yang karakternya material secara periodik kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dalam aspek ini ialah masyarakat luas jadi prinsip keterbukaan atau transparansi yang memungkinkan masyarakat untuk melihat dan memiliki akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah (Hanifah, 2015).
3. Peran Perangkat Desa  
Perangkat desa adalah salah satu unsur pelaksana desa mempunyai peran penting tersendiri dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa. Perangkat desa merupakan bagian dari komponen pemerintah desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur desa di bawah binaan kepala desa (Gunawan, 2013).
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)  
APBDes adalah suatu agenda keuangan tahunan desa yang diimplementasikan berlandaskan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan (Sumpeno, 2011). Adanya APBDes pengelolaan pemerintahan desa akan mempunyai sebuah konsep strategis yang terukur berlandaskan anggaran yang tersedia dan yang dimanfaatkan (Sari, 2015).

### **Teknik Analisis Data**

1. Uji instrumen penelitian: uji validitas dan uji reliabilitas
2. Uji asumsi klasik: uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas
3. Pengujian hipotesis: analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda,  
Dalam penelitian ini pengujian hipotesis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas yaitu, Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), Peran Perangkat Desa (X3) dalam variabel terkait yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Y). Rumus:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

- $X_1$  = Akuntabilitas  
 $X_2$  = Transparansi  
 $X_3$  = Peran Perangkat Desa  
 $a$  = Nilai Konstanta  
 $b_1, b_2, b_3$  = Koefisien Regresi  
 $e$  = *random error*

Pengujian hipotesis dengan regresi linear berganda mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Uji F
- b. Uji t
- c. Menguji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

## HASIL PENELITIAN

### 1. Deskripsi Responden

Responden dalam penelitian ini adalah anggota kelembagaan masyarakat desa di desa Jenalas.

**Tabel 1. Daftar Responden**

No.	Lembaga	Responden
BUMDES		
1.	Ketua	1
2.	Sekretaris	1
3.	Bendahara	1
		3
LKPP		
1.	Ketua	1
2.	Sekretaris	1
3.	Bendahara	1
4.	Anggota	12
		15
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat		
1.	Ketua	1
2.	Sekretaris	1
3.	Bendahara	1
4.	Anggota	7
		10
Badan Permusyawaratan Desa		
1.	Ketua	1
2.	Sekretaris	1
3.	Bendahara	1
		3
Tokoh Masyarakat		
1.	Ketua RT	21
2.	Ketua RW	5
3.	Tokoh lain	24
		50
Jumlah Sampel		81

Sumber: data sekunder yang diolah, 2019

### 2. Uji Instrumen Penelitian

Hasil uji validitas dengan menggunakan korelasi product moment Pearson menunjukkan bahwa semua variabel akuntabilitas, transparansi, peran perangkat desa dan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa dinyatakan valid karena  $p\text{ value} < 0,05$  sehingga semua item pernyataan tidak ada yang gugur dan dapat digunakan dalam penelitian. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai *cronbach's alpha* untuk semua variabel akuntabilitas (0,609), transparansi (0,624), peran perangkat desa (0,626) dan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (0,846)  $>$  nilai kritis (0,60), maka dalam penelitian ini keseluruhan variabel dikatakan reliabel.

### 3. Uji Asumsi Klasik

**Tabel 2. Hasil uji asumsi klasik**

Uji Asumsi Klasik	Hasil Uji	Kesimpulan
Multikolenieritas	<i>Tolerance</i> (0,759; 0,826; 0,910) <i>VIF</i> (1,317; 1,210; 1,099)	Tidak ada multikolinearitas
Autokorelasi	<i>p value</i> 0,577 $>$ 0,05	Tidak ada autokorelasi
Heteroskedastisitas	<i>p value</i> (0,246; 0,108; 0,146)	Tidak ada heteroskedastisitas
Normalitas	<i>p value</i> 0,479 $>$ 0,05	Residu terdistribusi normal

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

### 4. Hipotesis

#### a. Hasil uji statistik deskriptif

Hasil statistik deskriptif menjelaskan bahwa variabel akuntabilitas (X1) memiliki *range* 10,00, nilai minimal 29,00, nilai maksimal 39,00, nilai sum 2753,00, nilai *mean* 33,9877, *standar deviation* 2,15925 dan *variance* 4,662. Pada variabel transparansi (X2) memiliki *range* 10,00, nilai minimal 30,00, nilai maksimal 40,00, nilai sum 2914,00, nilai *mean* 35,9753, *standar deviation* 2,26371 dan *variance* 5,124. Pada variabel peran perangkat desa (X3) memiliki *range* 10,00, nilai minimal 30,00, nilai maksimal 40,00, nilai sum 2809,00, nilai *mean* 34,6790, *standar deviation* 2,36023 dan *variance* 5,571. Sedangkan pada variabel pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Y) memiliki *range* 7,00, nilai minimal 28,00, nilai maksimal 35,00, nilai sum 2561,00, nilai *mean* 31,6173, *standar deviation* 2,50783 dan *variance* 6,289.

#### b. Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas yaitu, akuntabilitas (X1), transparansi (X2), peran perangkat desa (X3) dalam variabel terkait yaitu anggaran pendapatan dan belanja desa (Y).

**Tabel 3. Regresi Linear Berganda**

Variabel	Koefisien Regresi	t	Sig
Constant	-6,395	-1,403	0,164
Akuntabilitas X1	0,315	2,872	0,005
Transparansi X2	0,464	4,637	0,000
Peran Perangkat Desa X3	0,306	3,347	0,001
F hitung: 23,721			0,000
Adj R Square: 0,460			

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Hasil tersebut dapat dijabarkan ke dalam persamaan sebagai berikut:

$$Y = -6,395 + 0,315 X_1 + 0,464 X_2 + 0,306 X_3$$

Hasil regresi linear yang diperoleh dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a: -6,395 artinya jika akuntabilitas (X<sub>1</sub>), transparansi (X<sub>2</sub>), dan peran perangkat desa (X<sub>3</sub>) sama dengan nol, maka pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Y) adalah negatif.
- b<sub>1</sub>: 0,315 artinya pengaruh variabel akuntabilitas (X<sub>1</sub>) terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Y) positif, artinya apabila variabel akuntabilitas (X<sub>1</sub>) meningkat, maka pengelolaan (Y) meningkat.
- b<sub>2</sub>: 0,464 artinya pengaruh variabel transparansi (X<sub>2</sub>) terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Y) positif, artinya apabila transparansi (X<sub>2</sub>) meningkat, maka dapat meningkatkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Y).
- b<sub>3</sub>: 0,306 artinya pengaruh variabel peran perangkat desa (X<sub>3</sub>) terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Y) positif, artinya apabila peran perangkat desa (X<sub>3</sub>) meningkat, maka dapat meningkatkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Y).

c. Hasil uji t

- 1) Hasil analisis variabel akuntabilitas diperoleh t hitung sebesar 2,872 dengan *p-value* sebesar  $0,005 < 0,05$  maka H<sub>0</sub> ditolak, berarti ada pengaruh yang signifikan akuntabilitas (X<sub>1</sub>) terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Y) pada Desa Jenalas. Dengan demikian hipotesis ke-1 yang menyatakan bahwa: “Ada pengaruh yang signifikan akuntabilitas terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Y) pada Desa Jenalas”, diterima atau terbukti kebenarannya.
- 2) Hasil analisis variabel transparansi diperoleh t hitung sebesar 4,637 dengan *p-value* sebesar  $0,000 < 0,05$  maka H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> diterima, berarti ada pengaruh yang signifikan transparansi (X<sub>2</sub>) terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Y) pada Desa Jenalas. Dengan demikian hipotesis ke-2 yang menyatakan bahwa: “Ada pengaruh transparansi terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Y) pada Desa Jenalas”, diterima atau terbukti kebenarannya.
- 3) Hasil analisis diperoleh t hitung sebesar 3,347 dengan *p-value* sebesar  $0,001 < 0,05$  maka H<sub>0</sub> ditolak, berarti ada pengaruh yang signifikan antara peran perangkat desa (X<sub>3</sub>) terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Y) pada Desa Jenalas. Dengan demikian hipotesis ke-3 yang menyatakan bahwa: “Ada pengaruh profesionalisme terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Y) pada Desa Jenalas”, diterima atau terbukti kebenarannya.

d. Hasil uji F

Hasil analisis diperoleh F hitung sebesar 23,721 dengan *p-value* sebesar  $0,000 < 0,05$  maka H<sub>0</sub> ditolak, berarti ada pengaruh yang signifikan variabel bebas yaitu akuntabilitas (X<sub>1</sub>), transparansi (X<sub>2</sub>) dan peran perangkat desa (X<sub>3</sub>) secara simultan terhadap variabel terikat yaitu pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Y) pada Desa Jenalas.

e. Hasil Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai *Adjusted R Square* = 0,460 = 46% berarti diketahui bahwa pengaruh / sumbangan yang diberikan oleh variabel bebas yaitu akuntabilitas (X<sub>1</sub>), transparansi (X<sub>2</sub>) dan peran perangkat desa (X<sub>3</sub>) terhadap variabel terikat yaitu pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Y) pada Desa Jenalas sebesar 46%



sedangkan sisanya (100% - 46%) = 54% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang tidak diteliti, misalnya dari tingkat keaktifan masyarakat dalam pengelolaan anggaran desa, tingkat pendidikan, dan lain-lain.

## PEMBAHASAN

### 1. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Hasil analisis diperoleh  $t$  hitung sebesar 2,872 dengan  $p$ -value sebesar  $0,005 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan akuntabilitas ( $X_1$ ) terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( $Y$ ) pada Desa Jenalas. Dengan demikian hipotesis satu ( $H_1$ ) yang menyatakan bahwa: “Akuntabilitas berpengaruh positif dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Jenalas”, diterima atau terbukti kebenarannya, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( $Y$ ). Pengujian variabel akuntabilitas terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( $Y$ ) pada Desa Jenalas menunjukkan bahwa semakin bertanggungjawabnya pemerintah desa dalam mengelola laporan keuangan pemerintahan desa maka akan meningkatkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang baik.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Indrianasari (2017) dan Sari (2015) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan pada pengelolaan keuangan desa. Penelitian lain yang tidak sejalan dilakukan oleh Faradhiba dan Nur Diana (2018) dengan hasil penelitian tidak berpengaruh positif, faktor yang membedakan dari hasil penelitian yaitu karena berbeda objek penelitian.

### 2. Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Hasil analisis diperoleh  $t$  hitung sebesar 4,637 dengan  $p$ -value sebesar  $0,000 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan transparansi ( $X_2$ ) terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( $Y$ ) pada Desa Jenalas. Dengan demikian hipotesis kedua ( $H_2$ ) yang menyatakan bahwa: “Transparansi berpengaruh positif dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Jenalas”, diterima atau terbukti kebenarannya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pengujian variabel transparansi terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menunjukkan bahwa semakin terbuka (transparan) pemerintah desa dalam mengelola laporan keuangan maka akan meningkatkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Hasil penelitian ini didukung penelitian Hanifah dan Sugeng Praptoyo (2015) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan pada pengelolaan keuangan desa.

### 3. Pengaruh Peran Perangkat Desa terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Hasil analisis diperoleh  $t$  hitung sebesar 3,347 dengan  $p$ -value sebesar  $0,001 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan peran perangkat desa ( $X_3$ ) terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( $Y$ ) pada Desa Jenalas. Dengan demikian hipotesis ketiga ( $H_3$ ) yang menyatakan bahwa: “Peran perangkat desa berpengaruh positif dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Jenalas”, diterima atau terbukti kebenarannya, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa profesionalisme berpengaruh positif terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pengujian variabel peran perangkat desa terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menunjukkan bahwa semakin berperan pemerintah desa dalam

mengelola laporan keuangan maka akan meningkatkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dijadikan acuan peneliti yaitu penelitian Indrianasari (2017) yang menyatakan bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya peran perangkat desa yang meningkat maka pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa akan ikut meningkat.

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa akuntabilitas, transparansi dan peran perangkat desa berpengaruh signifikan terhadap anggaran pendapatan dan belanja desa secara persial. Jika akuntabilitas, transparansi dan peran perangkat desa memiliki nilai yang meningkat maka anggaran pendapatan dan belanja desa akan semakin baik. Berdasarkan hasil penelitian ini maka pemerintah desa Jenalas sudah melakukan tugasnya sesuai prosedur atau aturan yang sudah ada, dengan begitu pengelolaan anggaran desa akan terlaksana dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Kementerian dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa.
- Sangki,Adianto Asdi, Ronny Gosal dan Josef Kairupan. 2017. Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi di Desa Tandu Kecamatan Lobak Kabupaten Bolaang Mongondow). 1(1).
- Arikunto, 2006. *Proses Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta. Jakarta
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Gunawan, Iman. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Pratik*. Bumi Aksara.Jakarta.
- Krina, L.L. 2003. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi.
- Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Faradhiba, Laily dan Nur Diana. 2018. Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Studi Kasus di desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo-Jombang). *E-JRA*. 7(7): 14-28.
- Indrianasari, Neny Tri. 2017. Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan desa (Studi pada Desa Karangasri Kecamatan Sukodono). *Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak*. 1(2): 29-46.
- Sari, Retno Murni. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru kabupaten Tulungagung. *Jurnal Kompilek*. 7(2): 139-148.
- Solekhan, Moch. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Setara Press. Malang
- Hanifah, Suci Indah dan Sugeng Praptoyo. 2015. Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*. 4(8): 1-15.
- Sumpeno, Wahjudin. 2015. *Perencanaan Desa Terpadu*. Read. Banda Aceh.